



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BEKASI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : INAYATULAH
2. Jabatan : ASISTEN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
3. NHK : 428675

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.387.392.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/160 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 248.208.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/70 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 42.750.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 87.996.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/70 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 252.098.000
5. Tanah Seluas 2514 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 120.672.000
6. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 168.000.000
7. Tanah Seluas 4000 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 192.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/84 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 216.548.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 432 m2/102 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 59.120.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 351.700.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.700.000



2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 342.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	451.527.999
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.190.619.999
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.190.619.999

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.